



Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Aceh Jaya Periode 2018-2022

Rika Asrina¹, Rita Nengsih², Ulfia³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah

¹asrinarika@gmail.com

²rita.nengsih@serambimekkah.ac.id

ulfia@serambimekkah.ac.id

ABSTRAK

Dana desa merupakan salah satu program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis yang paling banyak dibicarakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Besaran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus *Slovin* sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 100 orang. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis dengan metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022, besar pengaruhnya yaitu sebesar 3,625. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,508 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 50,8%. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,395 atau 39,5% yang artinya bahwa variabel Alokasi Dana Desa (ADD) mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat desa sebesar 39,5%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 60,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD); Kesejahteraan Masyarakat Desa; Kabupaten Aceh Jaya

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan issue fundamental masyarakat Indonesia dan isu utama di banyak negara berkembang (Nengsih dkk, 2015). Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia. Dana desa merupakan salah satu program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis yang paling banyak dibicarakan, dimana seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa diperkirakan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran yang diberikanpun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar rupiah (DJPK, 2016). Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui desa yang mengakibatkan peran desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan



menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat dimana masyarakat belum mampu meningkatkan penghasilannya dengan usaha yang dimiliki dan masih melekat anggapan bahwa rakyat di pandang sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Keadaan ini, menyebabkan masyarakat sangat tergantung kepada pemerintah dalam melindungi, menyelamatkan dan mensejahterakan kehidupan mereka. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan, karena akan memperlemah daya juang dalam memecahkan permasalahan maupun menumbuhkan partisipasi pembangunan yang berkelanjutan. Adapun jumlah penduduk Perkecamatan di Kabupaten Aceh Jaya dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Perkecamatan Kabupaten Aceh Jaya

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Teunom	13.439	13.706	13.471	13.842	13.901
2	Krueng Sabee	6.868	7.004	6.824	7.015	7.224
3	Setia Bhakti	7.755	7.909	8.513	8.654	8.750
4	Sampoiniet	16.567	16.897	17.814	17.984	18.054
5	Jaya	8.907	9.085	9.073	9.240	9.321
6	Panga	7.388	7.535	7.910	8.102	8.256
7	Indra Jaya	6.796	6.931	6.891	6.941	7.056
8	Darul Hikmah	16.554	16.882	15.187	16.842	16.903
9	Pasie Raya	6.813	6.948	7.476	7.854	7.952

Sumber: BPS Aceh Jaya (2023)

Berdasarkan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka kesejahteraan masyarakat desa perlu diperhatikan agar semua penduduk desa dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut mengundang perhatian peneliti karena peneliti menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah permasalahan dimana peneliti melihat adanya ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah desa tentang prioritas penggunaan dana desa dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) (Jasuli dan Karman, 2013, dan Muslihah, dkk, 2019).

Menurut Syachbarani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta hasil pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten. ADD merupakan dana yang cukup signifikan



bagi Desa yang menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah desa dan pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari ADD.

Fenomena Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa kecenderungan pada program yang akan dilaksanakan demi menunjang kesejahteraan masyarakat desa, banyaknya bantuan dana besar yang diberikan dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola ADD. Banyaknya pemerintah desa yang menyalahgunakan dana bantuan tersebut mengakibatkan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya dana desa tidak tercapai sehingga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Menurut Santosa (2008) ADD juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pendesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya, salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan ADD. Penggunaan ADD juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. keuangan desa. Pengelola dana desa diharuskan mengelola keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Belum tertibnya administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah permasalahan yang mendasar dari pengelolaan dana desa ini, untuk itu dana desa harus dikelola sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satu asasnya adalah akuntabilitas.

Pengelolaan dana desa yang baik mulai dari tahap pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik pula dengan segala bentuk potensi ekonomi yang ada. *Stake holder* desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana desa secara administratif, karena salah satu syarat pencairan anggaran dana desa adalah laporan pertanggungjawaban. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Muslihah, dkk (2019), Sumarni (2020) yang menyatakan bahwa ADD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bedasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022.



METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada desa yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Objek penelitiannya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2013:188) populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian objek yang akan diteliti yang dapat mewakili dari populasi. Selanjutnya Arikunto (2013:112) menyatakan apabila subyeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Populasi dalam penelitian ini adalah 97.417 masyarakat desa yang ada di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022. Penentuan jumlah sampel memakai rumus *Slovin*, sehingga diperoleh 100 orang yang akan menjadi responden. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel yaitu:

1. Masyarakat desa yang tinggal di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Masyarakat berdomisili > 10 tahun di Kabupaten Aceh Jaya.
3. Masyarakat yang berumur diatas 20 tahun

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Metode Analisis Data

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka metode analisis data yang digunakan adalah alat analisis yang bersifat kuantitatif yaitu model statistik, hasil analisis nantinya akan disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Dalam hal ini penelitian kuantitatif bertujuan untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022. Adapun menurut Sugiyono (2014: 168) model persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X + e$$

Keterangan:

- | | |
|---------|---|
| Y | = Kesejahteraan Masyarakat Desa |
| a | = Konstanta |
| β | = Koefisien Regresi |
| X | = Alokasi Dana Desa (ADD) |
| e | = <i>Error Term</i> (Variabel Peganggu) |



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier Sederhana

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,794	,338		5,315	,000
Alokasi Dana Desa	,203	,056	,184	3,625	,007

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data diolah (2023)

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23.0 seperti terlihat pada Tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 1,794 + 0,203 X$$

Dari hasil persamaan regresi di atas diketahui hasil uji regresi linier sederhana sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,794 artinya jika faktor variabel bebas (alokasi dana desa) dianggap konstan maka peningkatan variabel terikat (kesejahteraan masyarakat) sebesar 1,794 pada satuan skala likert.
2. Koefisien regresi alokasi dana desa (X) sebesar 0,203, artinya setiap 100% perubahan dalam alokasi dana desa akan meningkatkan variabel kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 20,3%.

Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,508 ^a	,395	,175	,2147

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data diolah (2023)

Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji T_{hitung} , T_{tabel}

Model	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig
1 (Constan)	5,315	,1966	,000
Alokasi Dana Desa	3,625	,1966	,007



a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Data diolah (2023)

H₁: Jika t_{hitung} sebesar $3,625 > t_{tabel}$ ($3,625 > 0,1966$), dengan nilai Sig= 0,005 ($0,007 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya periode 2018-2022 dimana t_{hitung} sebesar $3,625 > t_{tabel}$ ($3,625 > 0,1966$) bernilai positif dan nilai signifikan adalah $0,007 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya karena pengelolaan dana desa yang tepat dapat memberikan dampak kepada masyarakat desa dalam mensejahterakan dan membantu masyarakat yang ada di desa pada Kabupaten Aceh Jaya. Semakin baiknya pengelolaan dana maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan harapan semua masyarakat. Apabila dana desa tersebut berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat akan memberikan penilaian positif terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslihah, dkk (2019), Fathoni, dkk (2019), Rimawan dan Aryani (2019), Sumarni (2020) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,508 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebesar 50,8%, artinya kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya mempunyai hubungan yang erat dan positif dengan alokasi dana desa sebesar 50,8%. Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah sangat mempengaruhi Pembangunan desa. Dengan adanya dana desa terlihat banyaknya Pembangunan yang dilakukan di desa salah satunya Pembangunan jalan desa yang mana ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yang nantinya ini dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat desa dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan dari dampak pembangunan ini. Adanya pembangunan selokan juga mempengaruhi kehidupan Masyarakat desa disektor kesehatan lingkungan. Pembangunan ini mengurangi dampak penyebaran penyakit yang berasal dari penyebaran nyamuk dan lainnya. Serta program – program lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat desa. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,395, artinya setiap perubahan-perubahan dalam variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam variabel alokasi dana desa sebesar 0,395 atau 39,5% dan sisanya sebesar 60,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan lain sebagainya. Perubahan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh alokasi dana desa ini terlihat masih rendah, hal ini dimungkinkan karena masih rendahnya pengelolaan dana desa, alokasi dana desa yang belum memadai dan belum tepatnya program – program pemberdayaan masyarakat yang disusun sehingga dana desa masih belum mencapai pemberdayaan masyarakat yang optimal seperti penelitian Octrian, dkk (2013) yang



menyimpulkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan dana desa, hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti alokasi dana yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selain itu alokasi dana ini sering terlambat diberikan dan rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat implementasi program alokasi dana desa padahal dari alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya dimana besar pengaruhnya sebesar 3,625. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,508 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebesar 50,8%, artinya kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Aceh Jaya mempunyai hubungan yang erat dan positif dengan alokasi dana desa sebesar 50,8%. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,395, artinya setiap perubahan-perubahan dalam variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam variabel alokasi dana desa sebesar 0,395 atau 39,5% dan sisanya sebesar 60,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Fathony, Aditya Ahmad, ddk. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Langosari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 10, No. 3.
- Jasuli, Darman dan Karman. 2013. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Dampak Tentang Pelaksanaan PNPM-MP Di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep). *Jurnal Ilmiah MITSU*. Vol. 1, No. 2.
- Muslihah, Siti, dkk. 2019. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen*. Vol. 7, No. 1. ISSN: 2548-9836.
- Nengsih, R., Sari, J. D. P., Maulida, Z., & Sijabat, F. N. 2015. The effectiveness of urban independent community empowerment program (PNPM) in tackling poverty in Indonesia. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(6), 320.
- Nengsih, R., Sufitrayati, S., Maksalmina, M., Fitria, F., & Maulida, Z. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Aceh. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 3, No. 1, pp. 574-582).
- Nengsih, R. 2020. Factors Affecting the Value of Regional Government Financial Reporting Information. In *Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Research* (Vol. 3, No. 1, pp. 164-170).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta.



- Octrian, TSL, dkk. 2013. Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3, No.1.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rimawan, M. dan Aryani Fenny. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*. Vol. 9, No. 3.
- Santosa. 2008. *Pengelolaan Keuangan Desa*. PT. Alumni. Bandung
- Sanusi, & Djumlani. 2019. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa di Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju. *E-journal Katalogis*. Vol. 2, No.2.
- Sjafrizal. 2016. *Perencana Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarni, Mutia. 2020. Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol 5. No. 1.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Tesis: Universitas Gajah Mada.
- Ulfah, A. K., Yunina, Y., Nurzianti, R., Nengsih, R., & Kadriyani, E. 2021. Analysis of Financial Reporting Accounting Information Systems at The Aceh Financial Services. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 711-717.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.